

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Judul, Peneliti, Tahun	Latar Belakang	Teori	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Penyidikan Kepribadian <i>Dark Triad</i> terhadap Propensitas Berkomitmen Kejahatan Keras Putih, Maghfirah & Putri, (2019)	Beberapa aturan hukum yang telah diterapkan belum mampu mencegah niat untuk melakukan Kejahatan Keras Putih. Fenomena kejahatan keras putih masih terjadi karena keunikan individu terlindungi. Tidak semua individu yang tertekan, serakah, dan oportunistik sebenarnya melakukan tindakan kejahatan keras putih. <i>Dark Triad</i> adalah ciri kepribadian yang memiliki tiga elemen negativitas seperti Machiavellianisme, narsisme, dan psikopati.	<i>Economic theory of crime behavior</i> dan <i>dark triad theory</i>	Deskriptif kualitatif	Dapat disimpulkan bahwa semua komponen kepribadian <i>dark triad</i> memiliki pengaruh positif pada kecenderungan untuk melakukan kejahatan keras putih. Jika tidak ada kemungkinan tertangkap, niat untuk melakukan kejahatan keras putih akan lebih tinggi. Namun, jika ada kemungkinan tertangkap 10 persen, niat akan lebih rendah.

No.	Judul, Peneliti, Tahun	Latar Belakang	Teori	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
		<p><i>Dark Triad</i> memiliki hubungan psikologis yang kuat dengan tindakan penipuan. Saat kepribadian <i>dark triad</i> digabungkan, mereka dianggap prediktif tidak berperasaan, pencarian diri, dan sikap dan perilaku manipulatif.</p>			
2.	<p>Sisi Lain Pengadaan Barang dan Jasa dalam Sebuah Studi Dramaturgi, Harziani et al., (2017)</p>	<p>Kasus <i>fraud</i> di sektor Pemerintahan dapat terjadi di Institusi-Institusi pendidikan di kota-kota besar maupun kota-kota kecil dengan modus operasi yang berbeda. Dalam kasus pengadaan barang dan jasa baik pengguna maupun rekanan memainkan perannya ketika</p>	<p>Teori <i>fraud</i> dan teori dramaturgi</p>	<p>Deskriptif kualitatif</p>	<p>Pengelolaan pengadaan barang dan jasa di Fakultas Y terindikasi mengandung <i>fraud</i>. Bentuk indikasinya berupa pelibatan rekanan dalam melakukan proses pengadaan barang dan jasa. Pemaknaan atas <i>fraud</i>, menimbulkan persepsi yang berbeda tergantung sudut pandang aktor masing-masing. Bagi rekanan praktek pemberian hadiah atau <i>sharing</i> keuntungan bukan lagi sebagai kerelaan sekedar ucapan terima kasih, namun lebih kepada keharusan untuk memperlancar proses pengadaan sekaligus melanggengkan kekuasaannya di Fakultas Y. Sedangkan bagi aparaturnya pemberian hadiah lebih kepada kelaziman, pemberian yang memang diterima sebagai bentuk imbalan</p>

No.	Judul, Peneliti, Tahun	Latar Belakang	Teori	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
		<p>berhadapan satu sama lain. Apalagi jika dilihat dari sisi pengguna banyak pihak-pihak yang berkepentingan terhadap pengadaan. Pihak-pihak ini berperan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang telah dibebankan. Selayaknya pertunjukan drama, kelengkapan pertunjukan juga dipersiapkan oleh seorang aktor drama kehidupan. Kelengkapan pertunjukan ini yang nantinya menjadi penyuguh warna dan kehidupan dalam panggung drama.</p>			<p>atas kerja keras untuk melaksanakan proses pengadaan dari awal hingga akhir. Bagi staff pengadaan, lagi-lagi harus mengikuti proses yang sudah terbentuk, kelaziman yang sudah membentuk menjadi sebuah kebiasaan. Akhirnya, pemaknaan fraud di Fakultas Y masih menjadi sesuatu yang subjektif, tergantung pandangan masing-masing aktor dan lingkungan kerja yang melatarbelakangi. Sebagian aktor mengetahui bahwa apa yang dilakukannya adalah sesuatu yang mengarah pada tindakan <i>fraud</i>, namun adanya tekanan dari dalam diri dan lingkungan sekaligus kesempatan untuk mencurangi aturan menjadi alasan pembenar bagi aktor untuk melakukan hal ini. Hal ini seakan memberi kemasam lain bagi aktor untuk membudayakan sesuatu yang salah.</p>
3.	Dinamika Ketidakkonsistenan pengelolaan	Kurangnya transparansi pada pengelolaan	Teori dramaturgi	Deskriptif kualitatif	Keputusan dari pemerintah desa untuk mengalihkan dana alokasi dana desa di beberapa aspek. Pengalihan dana yang terjadi

No.	Judul, Peneliti, Tahun	Latar Belakang	Teori	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
	Dana Desa: Perspektif Dramaturgi, Fatmawati, (2018)	keuangan desa menyebabkan pencapaian tujuan pengelolaan menjadi kurang efektif, meskipun pelaksanaan kegiatan pembangunan dapat terselesaikan dengan baik. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa akan mempengaruhi keberhasilan dari tujuan pembangunan dan pengembangan masyarakat desa. Terdapat beberapa desa yang diduga melakukan manipulasi laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa untuk melakukan pencairan dana desa			menunjukkan bahwa terjadi ketidaksesuaian antara anggaran belanja desa untuk bidang penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan yang terdapat di APBDesa dengan realisasinya.

No.	Judul, Peneliti, Tahun	Latar Belakang	Teori	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
		<p>tahap berikutnya, meskipun masih terdapat kegiatan pembangunan dari dana desa yang belum terselesaikan. Adanya dugaan ketidaksesuaian kegiatan yang ditulis dalam banner dengan realisasinya yang disuarakan oleh masyarakat desa.</p>			
4.	<p>Dinamika Kisah “Si Kencur” dalam Memperbaiki Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas Retribusi Pelayanan Pasar: Suatu Kajian Dramaturgi, Yunarto et al., (2017)</p>	<p>Panggung sandiwara birokrasi merupakan sebuah analogi yang digunakan untuk menggambarkan dinamika kisah sandiwara yang terjadi di birokrasi. Pada panggung sandiwara birokrasi di sektor publik, terdapat</p>	Teori dramaturgi	Deskriptif kualitatif	<p>Secara umum dapat disimpulkan, <i>performance</i> atau pertunjukan proses penerimaan kas retribusi pelayanan pasar dipengaruhi oleh beberapa komponen utama yaitu: peran para aktor, skrip sebagai petunjuk pelaksanaan peran, properti yang digunakan dan panggung (<i>stage</i>) yang baik untuk mendukung pertunjukan. Dinamika konflik sosial yang terjadi akibat interaksi para aktor memang tidak dapat dihindari, yang terpenting adalah bagaimana mengolah permasalahan dan konflik (<i>conflict management</i>) tersebut menjadi konstruktif. Upaya memperbaiki sistem informasi akuntansi penerimaan kas</p>

No.	Judul, Peneliti, Tahun	Latar Belakang	Teori	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
		<p>berbagai kisah atau cerita yang menyoroti tentang kelemahan dan keterbatasan pada sistem pemerintahan baik di panggung pemerintahan pusat maupun di pemerintahan daerah. Masih banyak terjadi fenomena distorsi laporan keuangan, menyajikan informasi normatif, tidak sesuai dengan peraturan, dan dikemas dengan baik melalui tipuan hiasan angka dalam laporan keuangan sehingga menimbulkan kerugian negara.</p>			<p>retribusi pasar tidak dapat berjalan sendiri. Hal ini dapat terwujud dengan keselarasan tujuan dan dukungan peran para aktor baik yang berada di depan, belakang dan luar panggung, penataan <i>stage</i> yang lebih untuk memperlancar komunikasi dan informasi, penggunaan teknologi informasi (properti) yang dapat menghasilkan informasi yang bermanfaat (relevan, akurat, lengkap, dapat dipahami dan transparan), dan penggunaan strategi yang bersifat asosiatif.</p>

No.	Judul, Peneliti, Tahun	Latar Belakang	Teori	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
5.	Penerapan Prinsip-Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> pada PT Bulan Terang Utama, Sitepu (2016)	Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> menjadi daftar baru bagi semua perusahaan, tanpa terkecuali di bisnis properti. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> di PT Bulan Terang Utama.	Teori <i>Good Corporate Governance</i> merupakan suatu sistem (input, proses, output) dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (<i>stakeholders</i>) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan.	Deskriptif Kualitatif	PT Bulan Terang Utama telah menerapkan prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kesetaraan dan kewajaran. Dari sisi transparansi, perusahaan sudah terbuka kepada seluruh pemangku kepentingan mengenai informasi yang berhubungan dengan perusahaan. Selain itu PT BTU juga sudah menunjukkan tanggungjawabnya sebagai usaha berbadan hukum dengan menaati hukum negara yang berlaku. Perusahaan juga sudah mandiri dengan tidak adanya intervensi dari pihak lain maupun tidak adanya sikap saling melempar tanggung jawab. PT BTU juga sudah memperlakukan seluruh <i>stakeholder</i> secara sama tanpa ada pengistimewaan tertentu. Dari sisi akuntabilitas, PT BTU tidak terlalu teoritis dalam menerapkan strukturnya karena melihat lagi kondisi perusahaan. Selain itu tidak ditemukan adanya dokumen tertulis mengenai visi dan misi perusahaan maupun kode etik perusahaan.

No.	Judul, Peneliti, Tahun	Latar Belakang	Teori	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
6.	Penerapan Prinsip-Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> : Studi Deskriptif pada Perusahaan Keluarga Jasa Properti, Christian & Mustamu (2013)	Perusahaan keluarga memberikan kontribusi yang besar pada kegiatan ekonomi. Konflik yang timbul, seperti konflik kepentingan di antara para <i>stakeholder</i> seringkali terjadi di dalam perusahaan. Untuk dapat menyelesaikan konflik maka perlu memahami penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> .	Teori <i>Good Corporate Governance</i>	Deskriptif Kualitatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dari penerapan-penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> tersebut, masih ada sebagian dari prinsip <i>Good Corporate Governance</i> yang belum dilaksanakan dengan baik, yaitu prinsip <i>accountability</i> dan <i>responsibility</i>. 2. Prinsip <i>transparency</i> telah dijalankan dengan baik dimana perusahaan berusaha menyediakan informasi bagi karyawan secara transparan dan terbuka. 3. Prinsip <i>accountability</i> yang dijalankan di perusahaan kurang baik. 4. Prinsip <i>responsibility</i> juga sudah dijalankan, ada yang baik dan ada yang kurang baik. 5. Prinsip <i>independency</i> dalam perusahaan sudah dijalankan dengan baik, dimana tidak saling mendominasi dan tidak ada intervensi dari pihak lain. 6. Prinsip <i>fairness</i> yang dijalankan di perusahaan sudah baik.
7.	Pelanggaran Prinsip-Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (Studi Kasus PT Bank Lippo Tbk), Budiartini et al., (2012)	Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan di pasar modal harus selalu mengikuti peraturan yang ada dan telah ditetapkan oleh pasar	Teori <i>Good Corporate Governance</i>	Deskriptif Kualitatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prinsip-Prinsip GCG yang dilanggar oleh PT Bank Lippo Tbk. yaitu Prinsip Transparansi dan Prinsip Akuntabilitas. 2. Sanksi hukum atas pelanggaran Prinsip GCG di Pasar Modal yang dilakukan oleh PT Bank Lippo Tbk adalah berupa sanksi administratif.

No.	Judul, Peneliti, Tahun	Latar Belakang	Teori	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
		<p>modal itu sendiri. Terjadinya kejahatan dan pelanggaran di pasar modal diasumsikan beberapa alasan yaitu kesalahan pelaku, kelemahan aparat yang mencakup integritas dan profesionalisme serta kelemahan peraturan. Salah satu contoh yang merupakan pelanggaran prinsip GCG di pasar modal adalah kasus laporan keuangan PT Bank Lippo Tbk.</p>			
8.	<p>Penerapan Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> pada Perusahaan Properti PT Multi Royu Indonesia, Putra (2014)</p>	<p>Semua perusahaan milik negara agar mengikuti prinsip <i>Good Corporate Governance</i> sehingga perusahaan dapat berjalan dengan baik</p>	<p>Teori <i>Good Corporate Governance</i></p>	<p>Deskriptif Kualitatif</p>	<p>1. Prinsip <i>transparency</i> atau keterbukaan sudah dijalankan perusahaan ini dalam hal sistem informasi strategi pemasaran, kebijakan perusahaan, dan sistem pembayaran gaji dan komisi, tetapi visi misi, struktur perusahaan dan peraturan perusahaan tidak jelas hanya disampaikan secara lisan dan tidak bentuk tertulis.</p>

No.	Judul, Peneliti, Tahun	Latar Belakang	Teori	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
		<p>dan tidak muncul masalah di kemudian hari. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> pada PT. Multi Royu Indonesia.</p>			<ol style="list-style-type: none"> 2. Prinsip <i>accountability</i> atau akuntabilitas pada perusahaan ini tidak dijalankan dengan baik, karena perusahaan sudah memiliki sistem yang baik tetapi para pekerjanya tidak menjalankan sesuai dengan prinsip ini dengan melanggar beberapa peraturan perusahaan. 3. Prinsip <i>responsibility</i> atau pertanggung jawaban telah dijalankan oleh perusahaan dalam kepedulian sosial menaati peraturan pemerintah tetapi dalam hal keselamatan dan kesehatan para pekerja kurang diperhatikan. 4. Prinsip <i>independency</i> atau kemandirian di PT. Multi Royu Indonesia dijalankan oleh perusahaan karena tidak ada tekanan dari luar perusahaan dan tidak ada yang mendominasi di dalam perusahaan. 5. Prinsip <i>fairness</i> atau kewajaran di perusahaan ini sudah dijalankan dengan tidak ada diskriminasi atau perlakuan yang berbeda terhadap pihak tertentu di dalam perusahaan, memberikan kesempatan yang sama, dan memberikan hak para pekerja dengan pantas atau sewajarnya.
9.	<p>Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip <i>Good Corporate Governance</i></p>	<p>Implementasi prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG)</p>	<p>Teori <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) adalah salah satu pilar</p>	<p>Deskriptif Kualitatif</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prinsip <i>Transparency</i> dalam perusahaan PT Wang Konstruksi Indonesia dilihat dari penyampaian visi dan misi perusahaan secara lisan kepada karyawan namun tidak

No.	Judul, Peneliti, Tahun	Latar Belakang	Teori	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
	pada PT Wang Konstruksi Indonesia, Supit (2016)	menjadi suatu poin yang penting bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk mampu bertahan dan bertumbuh sekaligus untuk menumbuhkan kepercayaan dan keberlanjutan. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan prinsip-prinsip GCG pada PT Wang Konstruksi Indonesia.	dari sistem ekonomi pasar.		tertulis. 2. Prinsip <i>Accountability</i> yang dijalankan oleh PT Wang Konstruksi Indonesia masih belum dilaksanakan dengan maksimal. 3. Prinsip <i>Responsibility</i> dilakukan perusahaan dengan mentaati regulasi dan undang-undang yang berlaku. 4. Dalam penerapan prinsip <i>Independency</i> ini PT Wang Konstruksi Indonesia tidak terlihat adanya intervensi dari pihak luar dan negara. 5. Dalam penerapan prinsip <i>Fairness</i> , PT Wang Konstruksi Indonesia memperlakukan setiap karyawannya dengan setara yang disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki.
10.	<i>Corporate Governance and Dividend Reinvestment Plans: Insights from Imputation Tax in Australia</i> Tata Kelola Perusahaan dan Rencana Reinvestasi Dividen:	<i>The supply of Dividend Reinvestment Plans (DRPs) in relation to corporate governance and imputation tax system in Australia</i> Penyediaan Dividend Reinvestment Plans (DRPs)	<i>The agency theory</i> Teori keagenan	<i>Quantitative Descriptive</i> Deskriptif Kuantitatif	<i>Good governance should consider a variety of clientele demands for dividend policy, and investors perceive that good governance leads to an increasing share price. Also confirmed that the positive association between governance and DRP was weakened by the imputation tax, the more DRP and thus the greater accumulation of cash led by good governance is weakened when a firm adopts a franked dividend and further increase in cash retentions caused by the tax</i>

No.	Judul, Peneliti, Tahun	Latar Belakang	Teori	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
	Wawasan dari Pajak Imputasi di Australia, Abedi et al., (2020)	sehubungan dengan tata kelola dan sistem pajak imputasi di Australia			<p><i>credits generated by DRP</i></p> <p>Tata kelola yang baik harus mempertimbangkan berbagai permintaan klien untuk kebijakan dividen, dan investor memandang bahwa tata kelola yang baik mengarah pada peningkatan harga saham. Juga menegaskan bahwa hubungan positif antara tata kelola dan DRP diperlemah oleh pajak imputasi, semakin banyak DRP dan dengan demikian semakin besar akumulasi kas yang dipimpin oleh tata kelola yang baik dilemahkan ketika perusahaan mengadopsi <i>franked dividen</i> dan peningkatan lebih lanjut dalam retensi kas yang disebabkan oleh kredit pajak yang dihasilkan oleh DRP</p>

Sumber: Data penelitian diolah, 2021